

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Badruzaman, M. D. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdota*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri. 2015)
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016)
- Erwin, M. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018).
- Fuady, M. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Harahap, M. Y. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni. 1986)
- Keraf, A. S. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius,1998)
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Miru, A. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, 2007)
- Muchsin. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006).
- Nasution, A. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2007)
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1980)
- Nugroho, S. A. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rhiti, H. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011)
- Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok: Prenada Media Group, 2018)
- Sidharta, B. A. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).

- Sidharta, B. A. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)
- Sjahdeini, S. R. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)
- Sjahdeini, S. R. *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Subekti. *Hukum Perjanjian (Cetakan Ke IX)*. (Jakarta: PT. Intermasa, 2005).
- Suteki, & Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada,2020)

JURNAL:

- Jamil, N. K. Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 1048, 2020.
- Sidharta, B. A. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum dalam Jentera (Jurnal Hukum) "Rule of Law"*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004).
- Jamin Ginting dan Patrick Talbot, "Fundraising Aspect Of International Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspect", *Lex Scientia Law Review*, Vol.7, No.1, Mei 2023, DOI: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.60074>

INTERNET :

Blog, G. (t.thn.). *Gramedia.com*. "Teori Kepastian Hukum"
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>
diakses pada 11 April 2023

Badan Pusat Statistik. "Infografis Rumah Layak 2019"
<https://ntt.bps.go.id/backend/images/Infografis-Rumah-Layak-2019-ind.jpg>
diakses pada 5 mei 2023

Hukumonline.com. (n.d.). "Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli"

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
diakses pada 11 April 2023

Kompas. (2022, Februari 6).” Backlog Rumah Membengkak”
<https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/06/151343121/backlog-rumah-membengkak-jadi-1275-juta-apa-langkah-pemerintah?page=all#page2>
Diakses pada 5 mei 2023

Real Estate Indoneisa, “Kode etik Sapta Brata”
<http://rei.or.id/newrei/hal-kode-etik-sapta-brata.html> diakses pada 5 mei 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 serta perubahannya Undang-undang nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tarif baru PPH Final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan yang dibebankan kepada Penjual

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

